

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ILEGAL KE MALAYSIA

Oleh : Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU

Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sering menghadapi banyak masalah karena lemahnya perlindungan. Indonesia tidak mungkin memaksakan memberlakukan undang-undang dan ketentuan hukum Indonesia di negara tujuan tersebut. Indonesia dapat membuat perjanjian dengan negara penerima dengan menyepakati syarat-syarat kerjasama. Namun posisi Indonesia selalu mengalami kesulitan karena persaingan tidak sehat antar negara-negara pengirim tenaga. Pemberian perlindungan akan lebih sulit bagi tenaga-tenaga Indonesia yang masuk ke negara lain secara tidak resmi atau ilegal.

Karena kesulitan seperti itu, maka Indonesia harus membuat kebijakan yang menahan arus TKI yang berkualitas rendah ke luar negeri. Mereka sangat rentan terhadap berbagai pelecehan dan perlakuan tidak adil dari berbagai pihak. Untuk itu, kesempatan kerja di dalam negeri harus menjadi prioritas, disusul dengan

peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.

Kasus-kasus TKI cukup banyak dan meningkat akhir-akhir ini. Deportasi tenagakerja Indonesia dari Malaysia semakin sering menjadi masalah nasional, menguras banyak tenaga, dana dan waktu. Sementara para pejabat terus menerus sibuk menangani dampaknya, nampaknya tidak ada yang memahami akar permasalahan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengatasinya.

Arus tenagakerja ilegal yang cukup besar ke Malaysia mencerminkan tiga hal : Pertama, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja di Indonesia sudah sangat kritis, sehingga banyak angkatan kerja yang terpaksa mengambil risiko tinggi secara ilegal mengejar kesempatan yang tersedia di Malaysia.

Kedua, penghargaan pengusaha dan keluarga Indonesia terhadap pekerjanya sangat rendah. Tenagakerja ilegal dari

Indonesia pada umumnya hanya menjadi pekerja perkebunan dan pekerja rumah tangga di Malaysia sana. Kesempatan seperti itu di Indonesia relatif masih terbuka luas. Namun karena upah atau gaji yang sangat kecil di Indonesia banyak tenaga kerja Indonesia merebut kesempatan di Malaysia mengejar upah yang lebih tinggi. Tenaga yang belum berpengalaman di Indonesia, kemudian bekerja di perkebunan di Malaysia dapat menerima upah 5 kali lebih besar dari pekerja berpengalaman 10 tahun bekerja di perkebunan di Indonesia. Ini juga mengindikasikan bahwa kinerja manajemen perkebunan di Indonesia sangat rendah.

Ketiga, pengelolaan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dirasakan sangat mahal dan sangat birokratis. Setiap tenaga kerja yang akan dikirimkan secara resmi melalui PJTKI harus mengeluarkan antara Rp 5 juta - Rp 10 juta. Biaya pengiriman secara ilegal hanya sekitar Rp 2 juta - Rp 3 juta. Perbedaan biaya tersebut mendorong penduduk desa yang mempunyai keterbatasan dana mengambil risiko pengiriman secara ilegal.

Oleh sebab itu, memang banyak persoalan dalam negeri yang harus dibenahi. Pertama, perlu komitmen mengutamakan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri. Kedua, pembenahan organisasi pengerah tenaga kerja. Ketiga, perencanaan jangka panjang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Komitmen Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Negeri

Peranan dan manfaat pengiriman TKI ke luar negeri khususnya ke Malaysia dan Saudi Arabia sering terlalu dibesar-besarkan sebagai "pahlawan devisa". Padahal devisa yang mereka bawa ke Indonesia jauh lebih kecil dari devisa yang dibawa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ke negara asalnya. Bila semua TKI yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dipekerjakan di dalam negeri, manfaat dan dampaknya terhadap perekonomian dan kehidupan sosial jauh lebih besar daripada devisa yang mereka bawa.

Sekarang tantangan terletak pada komitmen nasional dan kreativitas Pemerintah Daerah Otonom. Beberapa studi menunjukkan bahwa di hampir seluruh

pelosok Tanah Air, dapat diciptakan kesempatan kerja yang mampu memberikan penghasilan dan penghidupan layak, dengan modal sekitar Rp 1,5 juta s/d Rp 2,5 juta per satu kesempatan kerja. Tiap TKI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal harus mengeluarkan sekitar Rp 2 juta - R 3 juta yang kemudian penuh risiko. Dengan kata lain, dana yang dikeluarkan untuk biaya menjadi pekerja ilegal ke Malaysia, sudah cukup untuk menciptakan kesempatan kerja di dalam negeri, dapat hidup layak dan tidak mengandung risiko tinggi. Untuk itu, Pemda setempat harus aktif dan kreatif untuk membuka peluang yang diperlukan.

Pembenahan Birokrasi dan PJTKI

Organisasi birokrasi pengurusan pengiriman TKI dan PJTKI terlalu berbelit dan terlalu mahal. Terlalu banyak instansi yang ingin terlibat menangani pengiriman dan pemulangan TKI, tetapi pada kenyataannya menjadi lebih banyak menambah beban biaya daripada memberi kemudahan dan pelayanan.

Pada mulanya, TKI tidak dikenakan biaya. Semua biaya termasuk keuntungan PJTKI dibebankan pada pengguna. Karena persaingan tidak sehat antar PJTKI, beban

pengguna di luar negeri menjadi kecil sementara beban TKI terus meningkat.

Rencana Jangka Panjang

Pengiriman TKI berkualitas rendah menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri mengandung terlalu banyak risiko, merendahkan martabat bangsa di forum internasional dan tidak memberikan dampak sosial ekonomis secara signifikan.

Terlalu sulit dan terlalu mahal mempersiapkan tenaga Indonesia berpendidikan SLTP untuk dikirim ke luar negeri, baik dalam teknis pekerjaan dan bahasa, maupun dalam sikap dan melindungi dirinya sendiri. Lulusan SLTP atau lebih rendah, membutuhkan pelatihan yang cukup lama dan intensif supaya dapat menggunakan alat-alat rumah tangga atau mengoperasikan alat-alat perkebunan di Malaysia.

Pembinaan sikap dan pemberdayaan mereka supaya percaya diri mengatasi berbagai masalah, juga memerlukan waktu panjang. Biasaya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. TKI dalam kualitas tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tenagakerja Pilipina dengan pendidikan yang sama.

Oleh sebab itu, setelah 5 tahun ke depan harus diusahakan supaya tidak lagi mengirimkan tenaga berpendidikan SLTP ke bawah. Mereka sebaiknya disiapkan untuk bekerja di dalam negeri. Lebih baik mempersiapkan lulusan SMU untuk PRT di luar negeri. Disamping itu tenaga-tenaga teknis berkualitas mulai dipersiapkan seperti perawat, pekerja kapal, pelayan

toko, pelayan hotel dan restoran, tukang listrik, tukang pipa, tukang kayu dan lain-lain. Lebih baik menekankan kualitas daripada kuantitas.***

**) Penulis adalah mantan pejabat senior Depnatkertran, dan sekarang sebagai peneliti dan Guru Besar di bidang sumberdaya manusia.*